

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Pada Kabupaten Pemekaran di Indonesia)

BAMBANG SUPRIYADI¹, ARYA HADI DHARMAWAN²,
SETIA HADI³ dan AKHMAD FAUZI⁴

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Raya Jatinangor – Sumedang KM.20 Jawa Barat,
² Ketua Prodi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pasca Sarjana IPB, ³ Sekretaris Prodi Ilmu
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Sekolah Pasca Sarjana IPB, ⁴ Ketua Prodi
Pascasarjana Ekonomi Sumberdaya Alam dan Departemen Ekonomi Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Abstrak: Background of this research is of existence of regional segregation become the autonomous regencies newly which tend to do not in control and do not reach of the target of regional segregation: society welfare. Counted 114 regencies of segregation formed in range of time 1999 - 2004 conducted by quartile and obtained by each proxy of quartiles: Regence of Rote Ndao, Regence of Mamasa and Regence of Rokan Hilir as research regions. Approach in this research is descriptive-quantitative with the case study strategy. Pursuant to research result in the reality third it's the economics growth regencies still under its mains regencies. Amount of people flatten under amount of its mains regencies. The economics growth is convergent in the reality at Governmental aid, especially sharing holder fund, non from its intern region economics.

Keywords: Regional Of Segregation, Quartile, Economic Regional Development

Sejak diberlakukan UU No, 22 Tahun 1999, proses pemekaran terjadi begitu cepat dan cenderung tidak terkendali. Selama kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2004, telah terbentuk 148 daerah otonomi baru yang terdiri dari 7 (tujuh) provinsi, 114 kabupaten dan 27 kota. Aspek yang kental terasa adalah justru bermainnya kepentingan pribadi, kelompok, etnis, agama, budaya yang dipicu rasa kecemburuan social, rasa iri, ambisi untuk menjadi penguasa di daerah dan sebagainya (DRSP, 2007). Pada kurun waktu 2007 dan 2009 daerah otonomi baru telah bertambah lagi dengan 57 kabupaten/kota, sehingga saat ini jumlah daerah otonomi di Indonesia totalnya menjadi 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota (Sumarsono, 2010).

Tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk mening-katkan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan perekonomian daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dalam nilai riel, artinya dinyatakan

dalam harga konstan (Tarigan, 2005). Selanjutnya Tarigan (2005) mengutip Boediono (1985:1) yang menyatakan "pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang". Jadi, persentase pertambahan *output* itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Menurut Boediono ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah "bersumber dari proses intern perekonomian tersebut".

Pelaksanaan otonomi daerah dapat disebut gagal apabila dua masalah mendasar di daerah belum teratasi yaitu (1) ketimpangan sosial-ekonomi antar daerah dan antar warga masyarakat, dan (2) kemiskinan belum dapat diberantas sampai tuntas. Masalah ketiga adalah pengangguran (terutama pengangguran terbuka) lebih merupakan masalah sektor ekonomi modern yang oleh ekonom sering dianggap "cukup mudah di atasi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan". Pengangguran tipe lain di negara-negara berkembang yaitu pengangguran tak kentara (tersembunyi) bisa di atasi meskipun tidak mudah, melalui program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat" (Mubyarto, 2001).

Permasalahannya, apakah suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu

tercipta karena banyaknya bantuan atau suntikan dana dari pemerintah pusat ataukah dari proses intern perekonomian wilayah itu sendiri. Bagaimana pertumbuhan jumlah penduduknya apakah lebih rendah ataukah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah mengidentifikasi apakah pertumbuhan ekonomi di tiga kabupaten berasal dari bantuan pemerintah pusat ataukah dari proses intern perekonomian wilayah yang bersangkutan dan bagaimana pertumbuhan penduduknya.

TINJAUAN PUSTAKA

"Industri" atau 'bisnis' pemekaran wilayah di masa reformasi terjadi juga disebabkan oleh faktor lemahnya Pemerintah Pusat (dan sebaiknya menguatnya *local power* pasca Soeharto). Lemahnya Pemerintah Pusat dipandang dari kepentingan daerah adalah peluang untuk mengajukan tuntutan (aspirasi) atau melakukan 'resistensi' terhadap negara (Ratnawati, 2009). Resistensi pada dasarnya perlu dilakukan untuk memperoleh kepatuhan. Namun, dalam memperoleh kepatuhan tersebut, sejumlah peneliti menemukan alasan yang berbeda-beda. Stanley Milgram (1974), misalnya, menemukan bahwa manusia atau kelompok individu sesungguhnya dapat dimanipulasi untuk menumbuhkan kepatuhan. Milgram menaruh perhatian pada bagaimana Hitler memanipulasi para pengikutnya sehingga patuh terhadap dirinya dalam membinasakan kaum Yahudi di benua Eropa. Menurutny, ada beberapa faktor yang membuat seseorang dapat dimanipulasi : adanya prakondisi yang sudah ditanamkan (disosialisasikan) pada kelompok yang akan diubah untuk menerima norma-norma otoritas, bila mematuhi akan diberikan imbalan atau hukuman bila sebaliknya; ada persepsi yang kuat terhadap figur otoritas dan ada faktor pengikut :setuju (persetujuan) untuk berpartisipasi (Kasali, 2006).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan pendapatan di wilayah tersebut. Bagi daerah, indikator ini sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta berguna pula untuk menentukan arah pembangunan pada masa yang akan datang. Data pertumbuhan ekonomi diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan. Harga konstan yang

digunakan adalah data harga tahun 2000 (BPS, 2009).

Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah esensinya menggambarkan perekonomian suatu daerah yang menghasilkan barang dan jasa sebagai agregat dari konsumsi (rumah tangga), investasi dan pengeluaran pemerintah (net ekspor). Sehingga implikasinya produktivitas suatu daerah sangat tergantung pada tinggi rendahnya output yang dihasilkan dalam suatu aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan faktor produksi yang terdiri dari *capital* dan *labor* sebagai komponen utama dalam perekonomian suatu daerah (Yulistiani, dkk, 2007) atau PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa (BPS, 2009).

Elit-elit lokal memanipulasi massa bergerak (gerombolan/*mobs*) di daerah-daerah untuk menekan pemerintah pusat yang lemah. Sebagaimana dikemukakan Ratnawati (2009), mobrokasi inilah yang tampaknya dikhawatirkan pemerintah pusat yang lemah itu karena dapat berdampak buruk pada stabilitas dan pembangunan citra yang sedang diupayakan. Seperti diketahui, SBY sangat menonjolkan politik pencitraan. Kemudian pusat yang tidak berdaya melakukan politik akomodasi atas tuntutan-tuntutan daerah, khususnya tuntutan pemekaran. Dengan dikabulkannya tuntutan pemekaran, maka daerah diharapkan dapat lebih 'tenang' (stabil). Padahal 'ketenangan' di daerah yang terjadi pasca pemekaran bisa saja merupakan 'ketenangan semu' yang diindikasikan oleh banyaknya konflik atau permasalahan akibat pemekaran.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRBadhb) atau PDRB nominal mengukur nilai *output* dalam satu periode dengan menggunakan harga pada periode tersebut. PDRBadhb berubah dari tahun ke tahun karena dua alasan. Pertama, output fisik barang berubah; dan kedua, harga pasar berubah. Perubahan pada PDRB nominal sebagai akibat dari perubahan harga tidak menjelaskan apapun tentang kinerja perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa (Mankiew, 2003), tetapi dengan PDRBadhb dapat diketahui sampai di mana harga-harga dan *output* fisik berbagai jenis barang dan jasa mengalami perubahan. PDRB atas dasar harga konstan (PDRBadhk) menunjukkan apa yang akan terjadi terhadap pengeluaran atas *output* jika jumlah berubah tetapi harga tidak, atau didasarkan atas harga pada tahun tertentu sehingga kenaikan

pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap sesuai. Laju pertumbuhan ekonomi umumnya diukur dari kenaikan nilai konstan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber, antara lain adalah dari pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan dari berbagai usaha lainnya yang sah menurut peraturan. Hanya saja, kemampuan daerah untuk memperoleh PAD rata-rata sangat rendah, bahkan untuk menutupi biaya rutin pun tidak memadai. Selain karena belum terbiasa, sumber-sumber pendapatan utama seperti pajak (dalam berbagai jenisnya) dan sumber daya alam tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Sampai tahun 2002, rata-rata penerimaan PAD kabupaten dan kota hanya sekitar 12,5 persen dari total dana yang diterima, sedangkan untuk provinsi sekitar 28 persen (Basri dan Munandar 2009).

Kontribusi PAD terhadap APBD yang rendah dan dominannya dana perimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten pemekaran menunjukkan ketergantungan fiskal kabupaten pemekaran pada dana perimbangan daripada mengandalkan pembiayaan dari PAD. Kuncoro (2004) telah mengidentifikasi faktor penyebab utama ketergantungan fiskal di Indonesia, setidaknya meliputi : (1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; (2) tingginya derajat desentralisasi dalam bidang perpajakan; (3) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; (4) adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi, maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan *separatism*; (5) kelemahan dalam pemberian subsidi.

Pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran BUMD dan BUMN. Peranan investasi swasta dan perusahaan milik Negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth* dan sebagai *center of economic activity*). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect*

yang besar (Mardiasmo 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada 114 kabupaten hasil pemekaran pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Lokasi kajian dilakukan di tiga kabupaten yang dipilih berdasarkan kuartil. Masing-masing kuartil selanjutnya dipilih wakilnya. Kuartil 1 diwakili Kabupaten Rote Ndao, kuartil 2 dan 3 diwakili Kabupaten Mamasa dan kuartil 4 diwakili Kabupaten Rokan Hilir. Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan September – Oktober 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif – kuantitatif dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu bentuk deskriptif – kuantitatif untuk meneliti pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data sekunder. Sumber data utama berasal dari BPS. Sedangkan sumber lain yang diperlukan seperti laporan studi dan penelitian yang dilakukan oleh instansi maupun perorangan, laporan ilmiah, peraturan perundangan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang disajikan dalam tabel frekuensi selanjutnya diinterpretasikan dan dinarasikan untuk menjawab tujuan penelitian.

PERTUMBUHAN EKONOMI DI TIGA KABUPATEN PEMEKARAN

Pendapatan Domestik Regional Bruto

Kabupaten Rokan Hilir menerima dana bagi hasil (2009) sebesar Rp. 911,07 miliar (VIVAnews). Sedangkan Kabupaten Rote Ndao yang miskin sumberdaya alam hanya menerima dana bagi hasil sebesar Rp. 19.025,37 juta (Rote Ndao Dalam Angka 2010) dan Kabupaten Mamasa menerima dana bagi hasil sebesar Rp. 19.516,35 juta (Mamasa Dalam Angka 2010). Data mentah EDOHP 2011 yang berasal dari Kementerian Keuangan menyebutkan Kabupaten Rokan Hilir menerima dana bagi hasil tahun 2009 sebesar Rp. 1.291,98 miliar dan Kabupaten Mamasa menerima sebesar Rp. 19,52 miliar, sedangkan Kabupaten Rote Ndao menerima sebesar Rp. 15,59 miliar.

PDRB adhb di tiga kabupaten meningkat terus

setiap tahunnya dan rata-ratanya (2005 – 2009) Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp. 24.384,4 miliar dengan minyak dan gas, sedangkan tanpa minyak dan gas sebesar Rp. 10.274,2 miliar; Kabupaten Mamasa Rp. 700,6 miliar; sedangkan Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 444,56 miliar. Dari data ini terlihat bahwa output barang dan jasa di Kabupaten Rokan Hilir sangat besar dan di Kabupaten Rote Ndao PDRBadhb hanya 1/55-nya Kabupaten Rokan Hilir dengan minyak dan gas dan Kabupaten Mamasa 1/35-nya dari Kabupaten Rokan Hilir.

Besarnya PDRBadhb itu terjadi karena perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir sumbangan terbesarnya berasal dari pertambangan dan penggalian (67,11%), Kabupaten Mamasa perekonomiannya utamanya pertanian (53,35%), disusul jasa (18,61%). Sedangkan di tahun 2009 Kabupaten Rote Ndao perekonomiannya masih ditopang peran pertanian yang mendominasi sebesar 44,45%; disusul sektor jasa 27,09%. Peran sektor pertanian semakin menurun setiap tahunnya 45,84% (2007) menjadi 44,83% (2008); hal itu disebabkan karena berkembangnya sektor jasa dan lain-lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di tiga kabupaten pemekaran, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Mamasa berfluktuasi dan cenderung melambat. Sedangkan di Kabupaten Rokan Hilir untuk laju pertumbuhan PDRB dengan minyak dan gas berfluktuasi dan cenderung menurun, begitu pula untuk tanpa minyak dan gas cenderung melambat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiga kabupaten pemekaran berfluktuasi. Perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya pertumbuhan per sektor yang melambat. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap capaian dari pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rote Ndao hampir tiga setengah kali lebih banyak dari laju pertumbuhan penduduk, dengan demikian Kabupaten Rote Ndao dapat berharap pembangunan ekonominya dapat berlanjut dan mensejahterakan masyarakatnya. Kabupaten Mamasa, laju pertumbuhan PDRBnya hampir lima kali pertumbuhan penduduknya, dan pemerintah Kabupaten Mamasa berharap pembangunan ekonominya berlanjut dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Kabupaten Rokan Hilir sebagai

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di tiga kabupaten pemekaran dan kabupaten induknya selama 2005 – 2009

Kabupaten pemekaran	Laju pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten induk	Laju pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan penduduk
Rote Ndao	- Fluktuatif, cenderung melambat	- Meningkat, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi	Kupang	- Fluktuatif, melambat, lebih rendah dari kabupaten pemekarannya	- Menurun, rata-raa minus dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi
Mamasa	- Fluktuatif, cenderung melambat	- Meningkat setiap tahun, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi	Polewali Mandar	- Fluktuatif, melambat	- Cenderung naik, lebih rendah dari pertumbuhan ekonominya
Rokan Hilir	- Kecil dengan migas dan cenderung menurun. Tanpa migas melambat dan lebih besar	- Meningkat setiap tahun dan lebih besar dari pd pertumbuhan ekonomi dng migas. Tetapi lebih kecil daripada tanpa migas	Bengkalis	- Fluktuatif, menurun dan kecil dengan migas. Tanpa migas, besar dan cenderung melambat	- Menurun, jumlah penduduk hampir sama dengan kabupaten pemekarannya. Rata-2 minus lebih kecil dari pertumbuhan ekonominya

Sumber : BPS, 2010

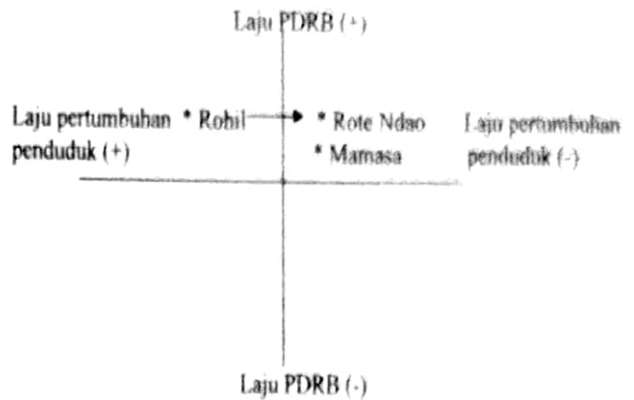
daerah baru yang menjanjikan, maka banyak penduduk pendatang sehingga laju pertumbuhan penduduknya rata-rata hampir lima persen. Dengan laju pertumbuhan PDRB tanpa minyak yang mencapai hampir delapan persen, maka pembangunan ekonominya lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk; tetapi apabila ditinjau dari laju pertumbuhan PDRB dengan minyak dan gas ternyata lebih rendah yang rata-ratanya hampir tiga setengah persen, maka pembangunan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir kurang dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten induknya, Kabupaten Rote Ndao laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada Kabupaten Kupang. Walaupun begitu dengan pertumbuhan penduduk yang minus, maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang lebih baik daripada di Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan di Kabupaten Polewali Mandar, laju pertumbuhan ekonominya cenderung melambat tetapi lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduknya, begitu pula di Kabupaten Bengkalis walaupun laju pertumbuhan ekonominya melambat dan kecil tetapi pertumbuhan penduduknya terus menurun, bahkan minus. Jadi kabupaten induknya, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Polewali Mandar masyarakatnya lebih sejahtera daripada di kabupaten pemekarannya.

Keadaan di tiga kabupaten pemekaran tersebut dapat dibuat dalam suatu diagram kuadran sebagai berikut : sumbu vertikal adalah laju pertumbuhan PDRB dan sumbu horizontal untuk laju pertumbuhan penduduk. PDRB Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Mamasa walaupun relatif kecil dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir, tetapi pertumbuhannya relatif lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan penduduknya. Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai laju pertumbuhan PDRB dengan minyak dan gas lebih kecil dari pada laju pertumbuhan penduduknya, untuk laju pertumbuhan PDRB tanpa minyak dan gas melebihi laju pertumbuhan penduduknya. Jumlah penduduk yang besar di Kabupaten Rokan Hilir yang hampir sama dengan jumlah penduduk di induknya sebetulnya dapat menjadi modal pembangunan yang potensial, apabila berkualitas tinggi dan laju pertumbuhannya tetap harus lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonominya.

Gambar 1.

Diagram laju pertumbuhan PDRB dengan laju pertumbuhan penduduk di tiga kabupaten pemekatan



Oleh karena itu, perekonomian Kabupaten Rokan Hilir harus lebih fokus pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan hotel, serta sektor pertanian yang menjadi andalan penduduk pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus bisa menarik investor di sektor pengolahan, terutama pengolahan pertanian untuk menunjang pengolahan komoditas kelapa sawit yang menjadi unggulan, yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak, sehingga tidak terjadi *backwash effect* dan dapat menjadikan *multiplier effect* bagi perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Mamasa yang berbasis pertanian – relatif tidak merusak lingkungan – pembangunan ekonominya semakin meningkat dan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pertumbuhan penduduknya, maka dapat diharapkan pembangunan yang dilaksanakan dapat berlanjut dan mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Rokan Hilir yang kaya raya dan berbasis pertambangan dan penggalian mempunyai pertumbuhan PDRB yang luar biasa besar dan cepat, tetapi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat melebihi laju pertumbuhan PDRBnya, maka pembangunan ekonomi yang dilaksanakan kurang dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Perekonomian yang didukung oleh sektor ekstraksi sumberdaya alam di Kabupaten Rokan Hilir memang sangat menjanjikan dan cepat berkembang, tetapi ada batasnya dan berdampak negatif yang sangat besar bagi lingkungan hidup, apalagi pemerintah daerah belum mempunyai rencana atau menyiapkan strategi bagaimana mengatasi dan mengantisipasi dampak

kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di wilayahnya di kemudian hari.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan pendapatan asli daerah yang rata-rata kecil, maka pemerintah daerah perlu berjiwa wirausaha untuk dapat menggerakkan perekonomian di daerahnya. Kuncoro yang mengutip Blakely menyatakan daerah pemekaran dalam pembangunan ekonomi daerahnya dapat memainkan peran-peran seperti wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator guna meningkatkan perekonomian daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga sebagai alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Pantai, jalan raya, dan pusat hiburan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja. Organisasi kemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjalankan kewirausahaan sebagai pencipta peluang kerja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan swasta, atau untuk menjamin tersedianya jasa yang tidak mampu disediakan oleh perusahaan swasta. Dengan peran sebagai wirausaha, pemda dituntut untuk jeli dan pro-aktif dalam mengembangkan bisnis daerah. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan aset pemda, mendorong pertumbuhan bisnis daerah, dan pemberdayaan masyarakat marginal (Blakely, 1989:69 dalam Kuncoro, 2004:113).

Penerimaan PAD rata-rata di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2009 sebesar Rp. 105.793 miliar; Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 5.094,08 miliar dan di Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 15.700 miliar.

Tabel 2. Perbandingan PAD di tiga kabupaten, tahun 2009 (juta rupiah)

	Kabupaten Rote Ndao	Kabupaten Mamasa	Kabupaten Rokan Hilir
PAD	15.700	5.094,08	105.793
APBD	208.616	315.261,67	1.478.387
PAD/APBD (%)	5,44	1,62	7,16

Sumber : BPS, 2011.

Kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Mamasa paling kecil, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten belum mampu mengembangkan sektor-sektor riil sehingga tidak dapat meningkatkan pajak dan retribusi daerah, serta hasil dari pengelolaan kekayaan daerah. Penerimaan PAD tersebut terbesar dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Belanja barang dan jasa serta belanja modal mencapai 50,48% dari total belanja dan lebih besar daripada belanja pegawai.

Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan kabupaten yang berbasis pertambangan dan penggalian, tetapi sektor pertanian/perkebunan sebenarnya sangat besar yang memberi kontribusi sebesar 22,88% bagi perekonomiannya. Hasil perkebunan yang utama adalah kelapa sawit, karet dan kopi. Belanja barang dan jasa serta modal yang mencapai 64,24% dari total belanja juga menggerakkan perekonomian daerah. Begitu pula di Kabupaten Rote Ndao dalam meningkatkan PAD terutama dari sektor pertanian, selain itu dengan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal yang mencapai 54,10 % dari total belanja pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah memacu perekonomian di wilayah tersebut. Apabila dibandingkan dengan belanja untuk pegawai, belanja untuk barang dan jasa serta belanja modal di ketiga kabupaten pemekaran lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memperhatikan pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing.

PAD Kabupaten Rote Ndao belum mampu untuk menggerakkan roda pemerintahannya, untuk menjalankannya bergantung pada dana perimbangan yang diterimanya dari Pemerintah pusat. Kabupaten Rokan Hilir meskipun merupakan kabupaten kaya raya, tetapi guna menjalankan roda pemerintahannya belum dapat mandiri sepenuhnya dari pendapatan asli daerahnya. Apabila dana perimbangan dihentikan, apakah roda pemerintahan di ketiga kabupaten pemekaran tersebut masih berjalan? Kuncoro (2006) mengatakan, terlihat jelas dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri dari pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan lain-lain penerimaan.

PENUTUP

Perekonomian di tiga daerah pemekaran cukup berkembang dengan karakteristik masing-masing. Kabupaten Rote Ndao yang merupakan daerah yang miskin, wajar apabila menggantungkan dana perimbangan dari Pemerintah pusat guna menjalankan roda pemerintahannya. Pertumbuhan ekonominya lambat, karena potensi yang untuk menggerakannya sangat terbatas. dan juga karena merupakan daerah yang terisolasi dengan akses yang sangat terbatas untuk mencapainya. Walaupun begitu laju pertumbuhan ekonominya melebihi pertumbuhan penduduknya, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Potensi yang ada seperti pantai-pantai yang indah yang sering digunakan untuk perlombaan selancar internasional perlu lebih dipromosikan, karena selama ini kelihatannya kurang promosi. Kontribusi PAD terhadap APBD kecil, sehingga perlu menggerakkan sektor riil seperti kerajinan rumah tangga dan pemberian bantuan bibit ternak dengan sistem bagi hasil (Kabupaten Rote Ndao mempunyai padang penggembalaan yang luas).

Kabupaten Mamasa mempunyai laju perekonomian yang lebih tinggi dari pertumbuhan penduduknya. PADnya sangat kecil karena tidak mempunyai industri besar, hasil pertanian dan perkebunan penduduk yang melimpah seperti kopi mestinya dapat memicu perekonomian di Kabupaten Mamasa dengan cara pengolahan kopi yang dilakukan di tempat (Mamasa) tidak di bawa ke luar wilayah sebagaimana saat ini. Hasil perkebunan ditampung dalam wadah koperasi, dan koperasi diwajibkan mengolahnya. Selain hal itu, kemampuan masyarakat yang relatif baik (IPM menengah ke atas) perlu diberi kesempatan mengembangkan diri untuk menunjang pariwisata yang potensial di Kabupaten Mamasa dengan kerajinan yang khas Mamasa.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang kaya raya dengan sumberdaya alamnya, meskipun begitu guna menjalankan roda pemerintahannya Kabupaten Rokan Hilir menggantungkan pada limpahan dana perimbangan dari Pemerintah pusat yang sangat besar jumlahnya. Antisipasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum kelihatan, sebenarnya apabila pemerintah daerah dapat menarik investor di bidang pengolahan pertanian yang lebih banyak, terutama untuk mengolah buah kelapa sawit, maka perekonomian Kabupaten Rokan Hilir akan semakin pesat berkembang. Pabrik-pabrik pengolahan kelapa

sawit yang berada di daerahnya akan menggerakkan perekonomian lainnya, sehingga menimbulkan efek domino (*multiplier effect*).

Kabupaten Rokan Hilir perlu mengantisipasi pertambahan penduduk yang tinggi sehingga pembangunan yang dilaksanakannya tidak sia-sia. Semua kabupaten untuk menggerakkan perekonomiannya, menggunakan dana perimbangan yang diterimanya dari Pemerintah pusat. Kabupaten Rokan Hilir yang paling berhasil memanfaatkan kekayaannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan PADnya, dan mengentaskan penduduk miskin sehingga jumlahnya hanya 6,73%.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri Faisal dan Munandar Haris. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia. Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia 2007 – 2008*. Jakarta : BPS
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Rote Ndao Dalam Angka 2009*. Kabupaten Rote Ndao : BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Mamasa Dalam Angka 2009*. Kabupaten Rokan Hilir : BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Rokan Hilir Dalam Angka 2009*. Kabupaten Rokan Hilir : BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, 2005 – 2009*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005 – 2009*. Jakarta: BPS.
- Kasali Rhenald. 2006. *Change. Tak Peduli Berapa Jauh Jalan Salah Yang Anda Jalani, Putar Arah Sekarang Juga (Manajemen Perubahan dan Manajemen Harapan)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro Mudradjad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kuncoro Mudradjad. 2006. *Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta

: UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mubyarto. 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia, Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Ratnawati Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Rustiadi Ernan, Saefulhakim Sunsun, Panuju Dyah R. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Tarigan Robinson. 2005. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Edisi revisi. Cetakan kedua. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sumarsono, dkk. 2010. *Potret 57 DOB – Sebuah Hasil Evaluasi Dini Perkembangan 57 Daerah Otonomi Baru*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- VivaNews <http://bisnis.vivanews.com/news/read....a-di-indonesia>. 28 Juli 2010:10.56
- Yulistiani Anny, dkk. 2007. *Analisis Terhadap Evaluasi Daerah Otonomi Baru Tahun Anggaran 2007*. Laporan Akhir, Desember 2007 : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri – Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
-